

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo

Ferawaty Mbuinga¹, Deby R. Karundeng², Mohamad Afan Suyanto³

^{1,2,3} Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Gorontalo

e-mail: fera.aries@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap belanja daerah kabupaten dan kota di provinsi gorontalo. Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dan metode analisis kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan pendapatana asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah kabupatenn/kota di provinsi gorontalo, dana bagi hasil berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah kabupatenn/kota di provinsi gorontalo, dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah kabupatenn/kota di provinsi gorontalo dan dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah kabupatenn/kota di provinsi gorontalo.

Kata kunci: pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, belanja daerah

Abstract

This study aims to analyze the effect of local revenue, general allocation funds, special allocation funds, and revenue-sharing funds on district and city expenditures in gorontalo province. In this research, the analytical method used is qualitative analysis method and quantitative analysis method. The results of the study show that local revenue has a positive and significant effect on district/municipality regional expenditures in gorontalo province, revenue-sharing funds have a negative and insignificant effect on regency/city regional expenditures in gorontalo province, general allocation funds have a positive and significant impact on district/municipal expenditures. Cities in gorontalo province and special allocation funds have a positive and significant impact on district/municipal expenditures in gorontalo province.

Keywords : regional original income; general allocation fund; special allocation fund; profit sharing fund; regional shopping

PENDAHULUAN

Berlakunya undang-undang no.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, membawa perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintah daerah. Undang-undang ini menegaskan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintahan pusat akan mentransferkan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Semangat desentralisasi, demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam proses penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan keuangan daerah yang sehat sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan good governance. Oleh karenanya dibutuhkan pengelolaan keuangan yang efektif dan transparan agar dapat memberikan kepercayaan masyarakat pada pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan sesuai dinamika dan tuntutan masyarakat (publik). penggunaan semua dana perimbangan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Namun

pemerintah daerah harus menggunakan transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan tersebut secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan standar pelayanan publik minimum serta disajikan secara transparan dan akuntabel. Akan tetapi pada praktiknya, transfer dari pemerintah pusat seringkali dijadikan sumber dana utama oleh pemerintah daerah untuk membiayai operasi utama sehari-hari, yang oleh pemerintah daerah dilaporkan diperhitungkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd).

Tujuan dari transfer dana adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum diseluruh negeri (simanjuntak dalam sidik et al dalam maimunah m, 2006). Tuntutan transparansi publik, kinerja yang baik dan akuntabilitas begitu sering ditujukan kepada para manajer pemerintah di daerah. Semakin tinggi derajat kemandirian suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Apabila dipadukan dengan derajat desentralisasi fiskal yang digunakan untuk melihat kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan, maka akan terlihat kinerja keuangan daerah secara utuh. Secara umum, semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif. Dalam hal ini, kinerja keuangan positif dapat diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah pada daerah tersebut. Dalam hal ini pendapatan asli daerah, khususnya berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah yang saat ini merupakan salah satu sumber penerimaan yang menjadi tumpuan daerah karena 90% diantaranya adalah menjadi hak daerah.

Disisi lain, alokasi dana alokasi umum berdasarkan kebutuhan daerah belum bisa dilakukan karena dasar perhitungan fiscal needs tidak memadai (terbatasnya data, belum ada standar pelayanan minimum masing-masing daerah, dan sistem penganggaran yang belum berdasarkan pada standar analisis belanja). Ditambah total pengeluaran anggaran khususnya apbd belum mencerminkan kebutuhan sesungguhnya dan cenderung tidak efisien. Sumber-sumber pendapatan daerah yang diperoleh dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/ kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Belanja (pengeluaran) pemerintah daerah yang oleh pemerintah daerah dilaporkan dalam apbd merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintahan. Dengan belanja yang semakin meningkat maka dibutuhkan dana yang besar pula agar belanja untuk kebutuhan pemerintah daerah dapat terpenuhi. Dengan terpenuhinya kebutuhan belanja pemerintah, maka diharapkan pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih baik dan kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat. Belanja daerah merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien, dimana belanja daerah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah. Apalagi dengan adanya otonomi daerah pemerintah dituntut untuk mengelola keuangan daerah secara baik dan efektif. Fenomena umum yang dihadapi oleh sebagian besar pemerintahan daerah di indonesia di bidang keuangan daerah adalah relatif kecilnya peranan (kontribusi) pada di dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd). Dengan kata lain peranan/kontribusi penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk sumbangan dan bantuan, bagi hasil pajak dan bukan pajak, mendominasi susunan apbd.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban

daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Dalam rangka memudahkan penilaian kewajaran biaya suatu program atau kegiatan, belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Fenomena yang terjadi dalam pengalokasian anggaran belanja terkait dengan sumber-sumber penerimaan daerah tersebut yaitu daerah banyak mengalokasikan mata anggaran yang tidak menyentuh secara langsung kepada masyarakat. Dana perimbangan yang dialokasikan pusat kepada daerah pada kenyataannya sebagian besar dialokasikan pada belanja pegawai/ belanja aparatur. Seperti kita ketahui bersama hampir setiap tahunnya pad, dau, dak dan dbh yang ada didalam APBD mengalami peningkatan, tetapi peningkatan tersebut belum dialokasikan secara tepat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Maemunah (2006), bahwa dau dan pad berpengaruh terhadap belanja bidang yang berhubungan langsung dengan publik, yaitu belanja bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum. Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat apakah pada belanja daerah sektor yang berhubungan langsung dengan masyarakat/publik juga masih terjadi flypaper effect atau tidak. Hasil yang didapat adalah bahwa untuk belanja bidang pendidikan tidak terjadi flypaper effect, sedangkan untuk belanja bidang kesehatan dan belanja bidang pekerjaan umum telah terjadi flypaper effect. Penelitian lain dilakukan oleh Bambang Prakosa (2004), yang melakukan penelitian pada kabupaten/kota di Jawa Tengah dan DIY. Hasilnya menunjukkan bahwa sandaran pemda untuk menentukan jumlah belanja daerah suatu periode berbeda. Dalam tahun bersamaan, pad lebih dominan daripada dau, tetapi untuk satu tahun kedepan, dau lebih dominan. Munculnya berbagai bentuk peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah mungkin merupakan indikasi untuk "mengimbangi" pendapatan yang bersumber dari pemerintah pusat salah satunya dau (Prakosa, 2004).

Kabupaten Pohuwato adalah daerah pemekaran Kabupaten Gorontalo yang terletak dalam wilayah provinsi Gorontalo merupakan daerah yang memiliki potensi daerah yang bisa dikembangkan. Pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato selalu berupaya menggali potensi daerah untuk mengoptimalkan penerimaan daerah. Potensi daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pendapatan yang bisa dikonversi dalam bentuk penerimaan. Namun realisasi penerimaan daerah belum mampu memenuhi pembiayaan belanja daerah, sehingga daerah ini masih tergantung pada dana perimbangan pemerintah pusat. Hal ini nampaknya memberikan hasil yang kontradiktif dengan semangat otonomi daerah yang semakin berkembang pada dewasa ini. Melihat tren dan fenomena tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato sewajarnya mulai memikirkan dan bertindak guna menggali potensi penerimaan daerah yang lain. Hal ini sesuai dengan undang-undang no 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang memberikan peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya termasuk obyek pajak baru dengan catatan sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Tindakan ini merupakan sebuah konsekuensi atas ditetapkannya undang-undang mengenai otonomi daerah yang menyebabkan pemerintah daerah harus dapat mengurangi ketergantungan anggaran dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan.

METODE

1. Jenis Dan Sumber Data

- a. Jenis data

Dalam penelitian ini, ada dua jenis data yang dikumpulkan oleh peneliti guna menguji hipotesis yang diajukan, yaitu:

- a) Data kuantitatif yang berupa berbagai jenis data dalam bentuk angka-angka.
 - b) Data kualitatif yaitu data yang dapat mendukung data kuantitatif dalam pemecahan kasus yang berupa penjelasan secara deskriptif terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi dalam pemecahan kasus seperti informasi – informasi yang berkaitan dengan masalah
- b. Sumber data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang telah ada pada obyek penelitian yang bersumber dari dokumen resmi badan keuangan daerah kabupaten pohuwato.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data sebagaimana yang dikemukakan oleh indriantoro dan supomo (2002,hal.152) yaitu :

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengutip beberapa literatur-literatur seperti : buku-buku, majalah, brosur dan karangan lainnya yang erat hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Dengan kata lain penulis mengumpulkan data yang sifatnya dokumen sehubungan dengan objek yang akan diteliti.
- b. Penelitian lapangan (*field research*)
 - 1) Observasi yakni teknik operasional pengumpulan data melalui proses pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap obyek yang diamati secara langsung.
 - 2) Wawancara (*interview*) yakni cara yang dilakukan dengan mengadakan wawancara terhadap pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan penjelasan tentang masalah-masalah yang ada hubungannya dengan materi pembahasan.

3. Tehnik Analisis Data

- a. Tehnik analisis kualitatif
Dalam hal ini akan di paparkan berdasarkan analisis kondisi obyektif dan temuan-temuan yang dihubungkan dengan teori-teori ilmiah, sehingga diperoleh gambaran secara sistematis, faktual dan aktual serta solusi-solusi terhadap pemecahannya.
- b. Tehnik analisis kuantitatif
Model analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisa pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap belanja daerah kabupaten pohuwato dengan metode analisis regresi berganda

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda digunakan untuk menghitung arah dan besarnya pengaruh variabel *independent* (pad, dana bagi hasil, dau, dan dak) terhadap variable *dependent* (belanja daerah) pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi gorontalo. Untuk pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan spss 23.

Tabel 1 hasil perhitungan regresi linear berganda

Model	Unstandardized coefficients		Standardized coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (constant)	-336844.314	102311.193		-3.292	.002
Pad	1.014	.373	.219	2.716	.011
Dana bagi hasil	-.029	.143	-.012	-.206	.838
Dau	1.783	.299	.583	5.971	.000
Dak	1.385	.335	.312	4.139	.000

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disusun persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = -336.844,314 + 0.219x_1 - 0.012x_2 + 0.83x_3 + 0.312x_4$$

Dari persamaan regresi linear berganda di atas, diketahui bahwa:

- 1) Nilai konstanta sebesar -336.844,314 berarti jika pad (x1), dana bagi hasil (x2), dana alokasi umum (x3) dan dana alokasi khusus (x4) nilainya adalah nol, maka belanja daerah (y) nilainya akan turun sebesar 336.844,314 juta rupiah.
- 2) Variabel pad memiliki nilai koefisien sebesar 0,219 yang berarti apabila pad mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka belanja daerah akan naik sebesar 0,219 satuan dengan asumsi variabel lain dianggap konstan, dan menunjukkan hubungan positif (searah).
- 3) Variabel dana bagi hasil memiliki nilai koefisien sebesar -0,012 artinya jika variabel dana bagi hasil mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka belanja daerah akan turun sebesar 0,012 satuan dengan asumsi variabel lain dianggap konstan dan (menunjukkan hubungan berlawanan).
- 4) Variable dana alokasi umum memiliki nilai koefisien sebesar 0,583 yang berarti apabila dana alokasi umum mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka belanja daerah akan naik sebesar 0,583 satuan dengan asumsi variabel lain dianggap konstan, dan menunjukkan hubungan positif (searah).
- 5) Variable dana alokasi khusus memiliki nilai koefisien sebesar 0,312 yang berarti apabila dana alokasi khusus mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka belanja daerah akan naik sebesar 0,312 satuan dengan asumsi variabel lain dianggap konstan, dan menunjukkan hubungan positif (searah).

2. Uji hipotesis

a. Uji Hipotesis Serempak (Uji F)

Uji f dilakukan untuk melihat apakah seluruh variabel *independent* memiliki pengaruh serempak yang signifikan terhadap variabel *dependent*.

Tabel 2 uji hipotesis secara serempak anova^a

Model	Sum of squares	Df	Mean square	F	Sig.
1 Regression	2127472139387. 377	4	531868034846. 844	66.82 1	.000 ^b
Residual	246747732419.3 73	31	7959604271.59 3		
Total	2374219871806. 749	35			

A. Dependent variable: belanja

B. Predictors: (constant), dak, dana bagi hasil, pad, dau

Dari hasil analisis regresi dapat diketahui bahwa secara bersama-sama variabel *independent* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel *dependent*. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai f hitung sebesar 66,821 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 atau 5%, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi belanja daerah atau dapat dikatakan bahwa pad, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja daerah pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Gorontalo.

b. Uji Hipotesis Parsial (Uji T)

Uji t merupakan uji statistik yang berguna untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independent secara parsial terhadap *return on assets*. dari tabel koefisien menunjukkan nilai t_{hitung} dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut sebagai berikut :

Tabel 3 uji hipotesis secara parsial

Model	Unstandardized coefficients		Standardized coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (constant)	- 336844.3 14	102311.1 93		-3.292	.002
Pad	1.014	.373	.219	2.716	.011
Dana bagi hasil	-.029	.143	-.012	-.206	.838
Dau	1.783	.299	.583	5.971	.000
Dak	1.385	.335	.312	4.139	.000

Dengan demikian hasil analisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dianalisa sebagai berikut :

1) Pengujian hipotesis pertama

Hipotesis pertama yang diajukan menyatakan bahwa pad berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Gorontalo. Dari hasil penelitian ini diperoleh nilai koefisien regresi untuk variabel pad, atau b_1 adalah sebesar 0,219, bertanda matematik positif dengan nilai signifikansi sebesar 0,011 yang lebih kecil dari 0,05. Nilai t-tabel (0.05,36) adalah 2,032. Oleh karena t-hitung > t-tabel atau 2,716 > 2,032 dan signifikansi $p = 0.020 < 0.05$, maka hipotesis pertama

dapat diterima. Ini berarti terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel *pad* terhadap belanja daerah pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Gorontalo.

2) Pengujian hipotesis kedua

Hipotesis kedua yang diajukan menyatakan bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Gorontalo. Dari hasil penelitian ini diperoleh koefisien regresi untuk variabel dana bagi hasil, atau b_2 , adalah sebesar -0,012 dengan tingkat signifikan sebesar 0,838. Dari tabel di atas diperoleh t -hitung = -0,206. Nilai t -hitung < t -tabel, $-0,206 < 2,032$ dan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 ($0,838 > 0,05$). Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Gorontalo tidak dapat diterima.

3) Pengujian hipotesis ketiga

Hipotesis ketiga yang diajukan menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Gorontalo. Dari hasil penelitian ini diperoleh nilai koefisien regresi untuk variabel dana alokasi umum, atau b_3 adalah sebesar 0,583, bertanda matematik positif dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Nilai t -tabel (0,05,36) adalah 2,032. Oleh karena t -hitung > t -tabel atau $5,971 > 2,032$ dan signifikansi $p = 0,000 < 0,05$, maka hipotesis ketiga dapat diterima. Ini berarti terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel dana alokasi umum terhadap belanja daerah pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Gorontalo.

4) Pengujian hipotesis keempat

Hipotesis keempat yang diajukan menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Gorontalo. Dari hasil penelitian ini diperoleh nilai koefisien regresi untuk variabel dana alokasi khusus, atau b_4 adalah sebesar 0,312, bertanda matematik positif dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Nilai t -tabel (0,05,36) adalah 2,032. Oleh karena t -hitung > t -tabel atau $4,139 > 2,032$ dan signifikansi $p = 0,000 < 0,05$, maka hipotesis keempat dapat diterima. Ini berarti terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel dana alokasi khusus terhadap belanja daerah pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Gorontalo.

c. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel independent mempengaruhi variabel dependent.

Tabel 4 uji koefisien determinasi

Model	R	R square	Adjusted r square	Std. Error of the estimate
1	.947 ^a	.896	.883	89216.614

Dari hasil tabel di atas menunjukkan bahwa koefisien determinasi untuk keempat variabel bebas diperoleh angka nilai r square sebesar 0,896. Artinya variabel *pad*, *dau*, dan *dak* memberi sumbangan pengaruh terhadap belanja daerah sebesar 89,6%. Sedangkan sisanya sebesar 10,4% dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda secara simultan variabel *pad*, *dau*, dan *dak* berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah

pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Gorontalo. Adapun pengaruh masing-masing variabel *independent* terhadap variabel *dependent* adalah sebagai berikut :

d. Pengaruh Pad Terhadap Belanja Daerah

Dari hasil penelitian diperoleh nilai koefisien regresi untuk variabel pad, atau b_1 adalah sebesar 0,219, bertanda matematik positif dengan nilai signifikansi sebesar 0,011 yang lebih kecil dari 0,05. Nilai t-tabel (0.05,36) adalah 2,032. Oleh karena t-hitung > t-tabel atau 2,716 > 2,032 dan signifikansi $p = 0.020 < 0.05$, maka hipotesis pertama dapat diterima. Ini berarti terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel pad terhadap belanja daerah pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Gorontalo. Artinya bahwa apabila pad meningkat maka belanja daerah juga akan meningkat, sebaliknya apabila pad turun maka belanja daerah akan turun.

Pad merupakan salah satu unsur pembentuk pendapatan daerah yang merupakan hasil dari potensi daerah itu sendiri seperti pajak, retribusi dan lain-lain. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang dihasilkan oleh daerah dalam wilayah yurisdiksinya yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran, dan harus didorong pertumbuhannya agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah yang setiap tahunnya terus meningkat.

Sejalan dengan pp no. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa pad disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Artinya, disetiap penyusunan APBD, jika pemerintah daerah akan mengalokasikan belanja daerah maka harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan pad yang diterima. Antara pad dengan belanja modal terjadi suatu hubungan timbal balik dalam keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi pad maka semakin tinggi pula belanja daerah.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari *et al* (2017); pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap alokasi belanja modal kabupaten/kota se-Bali. Hasil dari penelitian ini yaitu pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, dana bagi hasil dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, sementara pendapatan asli daerah dan sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.

e. Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah

Dari hasil penelitian ini diperoleh koefisien regresi untuk variabel dana bagi hasil, atau b_2 , adalah sebesar -0,012 dengan tingkat signifikan sebesar 0,838. Dari tabel di atas diperoleh t-hitung = -0,206. Nilai t-hitung < t-tabel, -0,206 < 2,032 dan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 (0,838 > 0,05). Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Gorontalo tidak dapat diterima.

Nilai negatif pada variabel dana bagi hasil menunjukkan adanya pengaruh yang berlawanan arah, maksudnya apabila variabel dana bagi hasil meningkat maka belanja daerah akan turun, sebaliknya apabila dana bagi hasil turun maka belanja daerah akan meningkat. Dana bagi hasil (DBH) merupakan dana yang berasal dari APBD yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil (DBH) yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam). Dana bagi hasil adalah sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) selain dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh sari *et al* (2017); pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap alokasi belanja modal kabupaten/kota se-bali. Hasil dari penelitian ini yaitu pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, dana bagi hasil dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, sementara pendapatan asli daerah dan sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.

f. Pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah

Dari hasil penelitian ini diperoleh nilai koefisien regresi untuk variabel dana alokasi umum, atau b_3 adalah sebesar 0,583, bertanda matematik positif dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Nilai t-tabel (0.05,36) adalah 2,032. Oleh karena t-hitung > t-tabel atau $5,971 > 2,032$ dan signifikansi $p = 0.000 < 0.05$, maka hipotesis ketiga dapat diterima. Ini berarti terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel dana alokasi umum terhadap belanja daerah pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Gorontalo.

Dau adalah dana yang berasal dari apbn yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan keuangan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Tujuan dari pemberian dana alokasi umum (dau) ini adalah pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, keadaan geografis, luas daerah, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan. Dengan dana tersebut pemerintah daerah menggunakannya untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada publik. Hasil ini menjelaskan bahwa provinsi yang mendapatkan dau yang besar akan cenderung memiliki belanja daerah yang besar. Hal ini terjadi karena dau digunakan untuk membiayai belanja daerah seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja lainnya.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh nisa a.a (2017); analisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan bagi hasil pajak terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015.

g. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah

Dari hasil penelitian ini diperoleh nilai koefisien regresi untuk variabel dana alokasi khusus, atau b_4 adalah sebesar 0,312, bertanda matematik positif dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Nilai t-tabel (0.05,36) adalah 2,032. Oleh karena t-hitung > t-tabel atau $4,139 > 2,032$ dan signifikansi $p = 0.000 < 0.05$, maka hipotesis keempat dapat diterima. Ini berarti terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel dana alokasi khusus terhadap belanja daerah pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Gorontalo.

Dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari apbn yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemanfaatan dak diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang dan tidak termasuk penyertaan modal. Dengan adanya pengalokasian dak diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena dak cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

Hasil ini menjelaskan bahwa kabupaten dan kota yang mendapatkan dak yang besar akan cenderung memiliki belanja daerah yang besar pula. Hasil ini memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja daerah akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan dak. Pendapatan daerah yang berupa dana perimbangan (transfer daerah) dari pusat menuntut daerah membangun dan

mensejahterahkan rakyatnya melalui pengelolaan kekayaan daerah yang proposional dan profesional.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh azizah dan syumita (2016), dengan judul pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap anggaran belanja modal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di provinsi gorontalo.
2. Dana bagi hasil berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di provinsi gorontalo.
3. Dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di provinsi gorontalo.
4. Dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di provinsi gorontalo.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, H. (2007). Akuntansi Sektor Publik: Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Abdul, H. (2007). Akuntansi Sektor Publik: Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Afiah, N. N. (2009). Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Anggreni Dan Artini (2019). Pengaruh Pad, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Badung Provinsi Bali. E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 8, No. 3, 2019: 1315 - 1345 Issn: 2302-8912 Doi: <https://doi.org/10.24843/Ejmunud.2019.V8.I3.P6>
- Badrudin, R. (2011). Pengaruh Pendapatan Dan Belanja Daerah Terhadap Pembangunan Manusia Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Buletin Ekonomi.
- Deputi Iv Bpkp. (2005). Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Revisi). Jakarta: Bpkp.
Doi: <https://doi.org/10.24843/Ejmunud.2018.V7.I03.P05>
- Erlina, Dkk. (2015). Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual Berdasarkan Pp No. 71 Tahun 2010 Dan Permendagri No. 64 Tahun 2013. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Ghozali, I., (2016). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program Ibm Spss 23, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Halim, A., & Darmayanti, T. (2007). Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Ykpn.
- Made A.J & Ni Putu Santi S.(2018). Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Belanja Modal Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Bali. E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 7, No. 3, 2018: 1255-1281 Issn : 2302-8912.
- Mankiw, N. G. (2000). Teori Makro Ekonomi, Edisi Ke Empat. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo, 2002. Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit: Andi, Yogyakarta
- Mardiasmo. (2008). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Cv Andi Offset.
- Murmaningtyas, V. W. K. (2007). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Pada

- Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2004-2006. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
- Nisa A.A (2017). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi* Vol 1 Jilid 2/2017 Hal. 203-214
- Nurlis. (2016). The Factors Affecting Of The Capital Expenditure Allocation Case: The Local Government Of Indonesia. *Research Journal Of Finance And Accounting*. Issn 2222-2847. Vol. 7, No. 1. Hal. 107-113.
- Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Sari Et Al (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Bali. *Jurnal Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*; Vol. 9, No. 1 Juli 2017 Issn: 2301-8879
- Sarwono, Jonathan. (2015). *Rumus-Rumus Populer Dalam Spss 22 Untuk Riset*, C.V Andi Offset, Yogyakarta.
- Sasana, H. (2011). Analisis Determinan Belanja Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Dalam Era Otonomi Dan Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 18(1).
- Sekaran, U. (2006). *Research Methods For Business*, Edisi 4, Jakarta: Salemba Empat.
- Sesung, R. (2013). *Hukum Otonomi Daerah: Negara Kesatuan, Daerah Istimewa, Dan Daerah Otonomi Khusus*. Bandung: Refika Aditama.
- Silalahi, Ulber, 2009. *Metode Penelitian Sosial*, Pt. Refika Aditama, Bandung
- Soleh, A. (2015). Analisis Belanja Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. *Ekombis Review*, 3(1).
- Susanti, D. A. (2017). Potensi Penerimaan Retribusi Pasar Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Karanganyar. Surakarta: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pendapatan Asli Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomisasi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pendapatan Asli Daerah.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah.
- Wijayanti Dan Darsana (2015); Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertumbuhan Ekonomi. *E-Jurnal Ep Unud*,4[3] : 1164-1193 Issn : 2303-0178
- Wiraswasta Et Al (2018). Pengaruh Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal Di Kota Dalam Wilayah Jawa Timur (Tahun 2009-2014). *Jurnal Bisnis Dan Manajemen* Vol. 5 No.2, Juni 2018, P 170-180 P-Issn : 1829-7528 E-Issn : 2581-1584